

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

Teori agensi didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan sebagai sekumpulan kontrak di antara faktor-faktor produksi dan hubungan di antara prinsipal dan agen. Dalam rerangka kerja teori agensi, baik prinsipal maupun agen membuat keputusan yang semata-mata dimotivasi oleh kepentingan pribadi. Kepentingan prinsipal diasumsikan sejalan dengan motif maksimalisasi laba perusahaan.

Sementara itu kepentingan pribadi agen mungkin saja sejalan dengan kepentingan perusahaan atau malah bertentangan (Jensen dan Meckling, 1997) dalam (Wardhani, 2008). Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan pemilik dalam hal terjadinya konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan.

##### **2.1.2 Konservatisme Akuntansi**

Basu (1997) dalam Sari dan Adhariani (2008) menyatakan konservatisme sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat dalam perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko inheren

dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan. Selain merupakan konvensi penting dalam laporan keuangan, konservatisme mengimplikasikan kehati-hatian dalam mengakui dan mengukur pendapatan dan aset.

Pendapat para peneliti yang menyatakan konservatisme dalam akuntansi bermanfaat apabila laba konservatif yang disusun menggunakan prinsip akuntansi yang konservatif mencerminkan laba minimal yang dapat diperoleh perusahaan sehingga dapat dianggap sebagai laba yang berkualitas (Almilia, 2004). Lebih lanjut, konservatisme akuntansi juga bermanfaat untuk menghindari perilaku oportunistik manajer berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media kontrak yang efisien dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (Watts, 2003).

Mayangsari dan Wilopo (2002) memiliki pendapat yang berbeda bahwa suatu laporan keuangan jika penyusunannya menggunakan metode yang konservatif, mengakibatkan laporan akuntansi yang dihasilkan cenderung bias dan tidak mencerminkan realita. Juanda (2007) menambahkan pernyataan yang mengkritik adanya prinsip konservatisme dalam pelaporan keuangan, yaitu bahwa terdapat dua aspek yang menjadikan konservatisme akuntansi mengurangi kualitas laporan keuangan terutama masalah relevansi.

Pertama, konservatisme melaporkan terlalu rendah baik laba maupun aset. Hal ini akan mempengaruhi kualitas relevansi laporan keuangan khususnya netralitas.

Karena ingin mempertahankan reliabilitas, kadang perusahaan mengabaikan relevansi informasi, atau sebaliknya. Misalnya, ketika mencatat kerugian kontijensi atau mencatat biaya riset dan pengembangan. Konservatisme

mendorong adanya penyimpangan karena sikap pesimistik, walaupun hal ini memang diharapkan oleh kreditor, namun akan menjadi masalah ketika melakukan analisis ekuitas. Kedua, konservatisme merupakan hasil dari penundaan pengakuan secara selektif terhadap berita baik, sementara dengan segera mengakui berita buruk. Hal ini dapat mengakibatkan *understatement* terhadap laba yang dilaporkan untuk periode saat ini, tetapi *overstatement* terhadap laba yang dilaporkan untuk periode yang akan datang.

### **2.1.3 Corporate Governance**

Definisi Corporate Governance sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berlandaskan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholders* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham. Ada empat unsur penting dalam *corporate governance* yang merupakan prinsip-prinsip dalam *corporate governance*, yaitu (Effendi, 2009):

#### **1. Fairness**

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin

terlaksananya komitmen dengan para investor. Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran ini.

## 2. *Transparency*

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

## 3. *Accountability*

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris.

## 4. *Responsibility*

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan.

### **2.1.4 *Corporate Governance* dan perspektif keagenan**

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan antara kepemilikan (di pihak *principal*/investor) dan pengendalian (di

pihak *agen/manajer*). Investor memiliki harapan bahwa manajer akan menghasilkan *returns* dari uang yang mereka investasikan. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi-spesifikasi apa sajakah yang harus dilakukan manajer dalam mengelola dana para investor dan spesifikasi tentang pembagian *return* antara manajer dengan investor. Secara ideal, investor dan manajer sebaiknya menandatangani kontrak yang lengkap/komplit, yang menspesifikasikan secara tepat apa saja yang akan dilakukan oleh manajer di segala kemungkinan yang terjadi, dan bagaimana laba perusahaan akan dialokasikan (Darmawati *et al.*, 2004).

Tujuan dari *corporate governance* diantaranya agar para pemegang saham dapat memperoleh haknya dan agar perusahaan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Effendi, 2009).

### **2.1.5 Proporsi Komisaris Independen**

Komisaris Independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* (*transparency, accountability, responsibility dan fairness*). Komisaris independen yang dimiliki

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman *good corporate governance* guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Wardhani, 2008).

### **2.1.6 Komite Audit**

Secara umum, komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris untuk mengawasi kinerja kegiatan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit, baik internal maupun eksternal di dalam perusahaan. Komite audit merupakan unsur penting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit dapat membantu dewan komisaris meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga dapat menjadi usaha perbaikan terhadap tata cara pengelolaan perusahaan karena komite audit akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

### **2.1.7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris**

Efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal memerlukan pertemuan rutin. Pertemuan yang teratur dan terkendali dengan baik akan membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan lebih mampu menawarkan kritik dalam hubungannya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh manajemen (Porter dan Gendall, 1993) dalam Rahmat *et al.* (2008).

Dengan melakukan pertemuan secara periodik, dewan komisaris dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan oleh manajemen karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terus menerus dan terstruktur sehingga setiap permasalahan dapat cepat terdeteksi dan diselesaikan dengan baik oleh manajemen.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

- Lara *et al.* (2005) juga melakukan penelitian mengenai hubungan *board of directors characteristics* dengan konservatisme akuntansi dengan sampel perusahaan-perusahaan di Spanyol. Penelitian mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *corporate governance* mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persyaratan adanya konservatisme akuntansi akan lebih mengurangi dampak yang disebabkan oleh risiko litigasi.
- Ahmed dan Duellman (2007) menguji mengenai karakteristik dewan terhadap konservatisme akuntansi menemukan bukti bahwa dewan komisaris berhubungan negatif signifikan dengan konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran akrual. Ukuran dewan menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan konservatisme akuntansi, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berhubungan negatif dan tidak signifikan.
- Wardhani (2008) meneliti mengenai pengaruh karakteristik dewan terhadap tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dengan obyek penelitian

sebanyak 69 perusahaan yang terdaftar di BEI dengan variabel independen yang digunakan yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit menunjukkan hasil bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat konservatisme dengan ukuran akrual, sedangkan kepemilikan manajerial dan independensi komisaris tidak berpengaruh positif.

- Indrayati (2010) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2005–2007, menemukan bukti bahwa karakteristik dewan komisaris yang terdiri atas proporsi komisaris independen, kepemilikan saham oleh komisaris yang terafiliasi, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.
- Rahmawati (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, *leverage*, dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi dengan sampel penelitian sebanyak 64 perusahaan manufaktur yang listing di BEI menemukan hasil bahwa sebanyak 57% perusahaan menerapkan konservatisme dan sebanyak 43% perusahaan tidak menerapkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, *leverage* berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, dan risiko litigasi juga berpengaruh negatif sedangkan ukuran perusahaan yang merupakan variabel kontrol mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi.
- Wulandini dan Zulaikha (2012) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap tingkat



konservatisme akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bukti bahwa variabel proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan tidak berhubungan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Sedangkan variabel kompetensi komite audit dan frekuensi pertemuan dewan komisaris berhubungan signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

- Munif (2013) melakukan penelitian pengaruh komite audit terhadap independensi auditor dalam kaitannya dengan laporan keuangan konservatif, dengan hasil penelitian kompetensi dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap *audit tenure* tidak berpengaruh signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

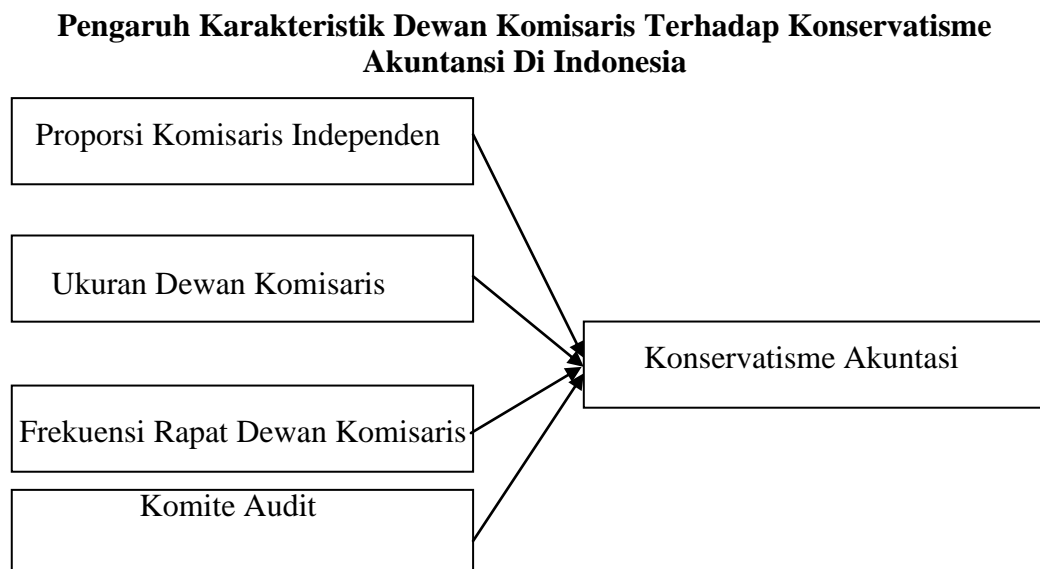
### **2.3 Model Penelitian**

Dewan komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam mekanisme *corporate governance*. Dalam tugasnya sebagai pengawas, dewan komisaris menghendaki adanya laporan keuangan yang akurat, andal dan dapat dipercaya. Ahmed dan Duellman (2007) dan Wardhani (2008) menyatakan bahwa konservatisme merupakan salah satu prinsip akuntansi yang diperlukan untuk membantu dewan komisaris dalam mengurangi biaya agensi dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan harga sahamnya. Selain itu, konservatisme juga dapat menghindari oportunistik manajer. Dengan demikian, dewan komisaris cenderung menginginkan penerapan prinsip akuntansi yang konservatif. Karakteristik dewan komisaris terkait dengan proporsi komisaris independen, ukuran dewan komisaris,

frekuensi rapat dewan komisaris dan komite audit akan mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi yang digunakan.

Untuk membantu dalam memahami mengenai pengaruh karakteristik dewan terhadap tingkat konservatisme akuntansi, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran. Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas kemudian dibuatlah hipotesis-hipotesis yang kemudian dapat digambarkan dalam sebuah kerangka pemikiran seperti di berikut:

**Gambar 1. Model Penelitian**



## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi

Ahmed dan Duellman (2007) menguji mengenai karakteristik dewan terhadap konservatisme akuntansi menemukan bukti bahwa dewan komisaris berhubungan negatif signifikan dengan konservatisme akuntansi yang diukur dengan ukuran

akrual. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Indrayati (2010) yang membuktikan bahwa karakteristik dewan komisaris yang terdiri atas proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi, sedangkan penelitian Wardhani (2008) menyatakan bahwa semakin banyak proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan akan menunjukkan dewan komisaris yang kuat maka semakin tinggi pula tingkat konservatisme yang diinginkan karena adanya persyaratan informasi keuangan yang lebih berkualitas. Apabila proporsi komisaris independen lebih sedikit maka monitoring yang dilakukan akan lemah sehingga manajer perusahaan memiliki kesempatan untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif dan kurang konservatif. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut:

***H1: Proporsi komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan***

### **2.9.2 Ukuran Dewan Komisaris terhadap Konservatisme Akuntansi**

Ukuran dewan komisaris merupakan elemen penting dari karakteristik dewan komisaris yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian Lara, *et al.* (2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *corporate governance* mensyaratkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Sedangkan Indrayati (2010) menemukan bukti bahwa karakteristik dewan komisaris yang terdiri ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat konservatisme akuntansi.

Ahmed dan Duellman (2007) menyatakan ukuran dewan komisaris berhubungan dengan adanya komite audit yang menjalankan tugasnya secara lebih spesifik. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif. Oleh sebab itu, diperlukan jumlah anggota dewan komisaris yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan supaya proses monitoring lebih efektif. Sehingga semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar kekuatan dari dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan penggunaan akuntansi yang konservatif akan semakin tinggi pula. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

***H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan.***

### **2.9.3 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Konservatisme Akuntansi**

Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen (Rahmawati, 2010).

Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris akan semakin baik. Dengan demikian, pengungkapan informasi sosial perusahaan juga akan semakin luas.

Pengawasan yang tinggi dari dewan komisaris mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Rapat dewan komisaris akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

***H3: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan***

#### **2.9.4 Keberadaan Komite Audit terhadap Konservatisme Akuntansi**

Komite audit mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan, serta memastikan bahwa pelaporan keuangan yang disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit dalam perusahaan, maka proses pelaporan keuangan akan termonitor dengan baik sehingga kecurangan oleh pihak manajemen akan terminimalisasi (Wulandini dan Zulaikha, 2012).

Wardhani (2008) memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat konservatisme. Oleh karena itu, keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit

akan meningkatkan kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

***H4: Keberadaan komite audit akan berpengaruh positif terhadap tingkat konservatisme akuntansi perusahaan***